



<b>News Title :</b> Terbitkan Perba Nomor 6/2023, Bappebti Mereformasi Pelaku Usaha di Bidang PBK	
<b>Media Name :</b> Jpnn.com	<b>Journalist :</b> rhs/jpnn
<b>Publish Date :</b> 26 September 2023	<b>Tonality :</b> Positive
<b>News Page :</b>	<b>News Value :</b> 0
<b>Resources :</b> Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)	<b>Ads Value :</b> 0
<b>Section/Rubrication :</b> Nasional	<b>Topic :</b> Perba Nomor 6/2023

JPNN.com » Nasional » Humaniora » Terbitkan Perba Nomor 6/2023, Bappebti Mereformasi Pelaku Usaha di Bidang PBK

## Terbitkan Perba Nomor 6/2023, Bappebti Mereformasi Pelaku Usaha di Bidang PBK

Selasa, 26 September 2023 - 10:55 WIB



Terbitkan Perba Nomor 6/2023, Bappebti mereformasi pelaku usaha di bidang PBK. Foto: Dokumentasi Bappebti

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mereformasi pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) agar memiliki nilai tambah menjadi lebih baik dengan mengutamakan transparansi, integritas, dan perlindungan kepada masyarakat/nasabah.

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan pihaknya menerbitkan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif.

"Peraturan ini merupakan salah satu pedoman teknis sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) diperlukan dalam rangka menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi saat ini yang berpengaruh pada industri PBK di Indonesia," kata Didid dalam keterangan.

**Baca Juga:**  
**Broker Resmi BAPPEBTI Menjadi Pilihan Terbaik Bagi Trader Muslim**

Didid menambahkan terbitnya peraturan ini sekaligus bukti nyata Bappebti adaptif dan terus menyesuaikan regulasi yang ada agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar.

"Selain itu, terbitnya Perba ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan SPA dan untuk lebih memperkuat perlindungan kepada masyarakat sebagai nasabah," kata dia.

Didid mengatakan dalam ketentuan tersebut terdapat 12 substansi, yaitu peningkatan integritas keuangan terkait permodalan; peningkatan ketahanan margin, peningkatan sarana informasi teknologi dan transparansi harga, penguatan pengelolaan risiko transaksi nasabah, penguatan proses penerimaan nasabah, tata kelola perusahaan penyelenggara dan peserta SPA, penetapan janji layanan perizinan di Bappebti, kantor cabang peserta SPA, penegasan ruang lingkup perubahan alamat kantor cabang peserta SPA, evaluasi pengawasan kantor cabang SPA, informasi publik, dan ketentuan peralihan.

**Baca Juga:**  
**BAPPEBTI Rekomendasikan Pospay Gold & MetalGO untuk Transaksi Fisik Emas Secara Digital**

Didid menegaskan peningkatan integritas keuangan terkait permodalan bagi penyelenggara SPA modal yang disetor sejumlah Rp 40 miliar dan mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp 35 miliar.

Sedangkan bagi peserta SPA modal disetor sejumlah Rp 30 miliar dan mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp 25 miliar.

Peningkatan ketahanan margin bagi peserta SPA atas posisi terbuka yang semula sebesar 150 persen menjadi 200 persen dari nilai margin awal (initial margin) atas posisi terbuka yang dimilikinya.

Baca Juga:

**Misteri Penyebab Kematian Terbakar Anak Pamen TNI di Lanud Halim Perdanakusuma**

“Hal lain yang tak kalah penting dari penegasan dalam Perba ini adalah adanya persyaratan sertifikat (Information Security Management System) ISO 27001 yang di dalamnya terdapat Statement of Applicability (SOA) untuk ISO 27017 (cloud security) dan ISO 27018 (cloud privacy) bagi penyelenggara SPA. Melalui kebijakan ini diharapkan pelaku SPA dapat lebih kompeten menjawab perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini,” tegas Didid.

Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Aldison menambahkan terkait penguatan proses penerimaan nasabah, wajib diterapkan prinsip mengenal calon nasabah atau Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) dan/atau Enhance Due Diligence (EDD) berbasis Regulatory Technology (Regtech) yang terkoneksi dengan data administrasi kependudukan.

Selain itu, calon nasabah yang dapat diterima adalah yang telah melakukan simulasi transaksi perdagangan berjangka atau memberikan surat pernyataan sebagai pengganti simulasi transaksi Perdagangan Berjangka bagi calon nasabah yang telah memiliki pengalaman transaksi, kemampuan dan pemahaman di bidang PBK.

“Prinsip KYC, CDD, EDD yang terkoneksi dengan data kependudukan serta persyaratan simulasi transaksi untuk calon nasabah adalah untuk memberikan kepastian berusaha dan upaya perlindungan kepada masyarakat. Kita harus pastikan masyarakat paham dengan mekanisme perdagangannya sebelum memutuskan bertransaksi. Di samping itu, dari sisi pelaku usaha akan mendapatkan data yang valid terkait calon nasabah,” tambah Aldison.

Dengan diterbitkannya Perba Nomor 6 Tahun 2023, maka Pasal 14 ayat (6) Perba Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka; Surat Edaran Kepala Bappebti No 226/BAPPEBTI/SE/08/2022 tentang Penghentian Penerbitan Perizinan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif; dan Surat Edaran Kepala Bappebti No 197/BAPPEBTI/SE/12/2015 tentang Perubahan Alamat Kantor Pialang Berjangka dicabut.

“Untuk memperlancar implementasi kebijakan SPA yang baru, Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2023 ini memberikan ruang bagi pelaku usaha, yaitu bursa berjangka, penyelenggara dan peserta SPA paling lambat enam bulan untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru dan jangka waktu pemenuhan ISO 27001 paling lambat 12 bulan sejak peraturan ini ditetapkan. Peraturan lengkap dapat diunduh di [https://bappebti.go.id/pbk/sk\\_kep\\_kepala\\_bappebti/detail/13164](https://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/13164),” kata Didid.  
(rhs/jpnn)